

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

*Corporate governance* adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengelola, mengawasi, dan mengatur untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk serangkaian kegiatan, proses, aturan, kebiasaan agar dapat tercipta sebuah akuntabilitas manajemen lebih terjamin. *Corporate governace* pada perusahaan diharapkan dapat menjadikan perusahaan menjadi lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan. *Corporate governance* yang baik, dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan juga dapat melindungi para pemegang saham dari segala bentuk kecurangan, sehingga perusahaan dipandang baik dan bersih. Dan juga, dengan *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan yang baik pula dan juga mengurangi peluang terjadinya tindakan yang hanya menguntungkan satu pihak didalam organisasi atau perusahaan.

Adanya perbedaan informasi yang terjadi antara pihak manajer dan pemilik (asimetri informasi) sangat sering menguntungkan para manajer sehingga dapat mengetahui aktivitas keseharian perusahaan. Dengan adanya pemisahan fungsional dapat memberikan pengawasan yang baik, sehingga kecurangan untu mengambil

manfaat atau keuntungan pribadi dapat dimilimalisir. Hal ini dilakukan guna menghindari benturan kepentingan.

Benturan kepentingan yang lebih akrab dengan istilah masalah keagenan dapat terjadi bila pengelola suatu perusahaan memiliki kurang dari 100 persen saham biasa perusahaan. Para investor/pemegang saham menunjuk pihak manajemen perusahaan untuk mengelola dana yang telah diinvestasikannya ke perusahaan, dan manajemen memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan nilai dari perusahaan dan berupaya untuk mningkatkan nilai investasi atau kekayaan dari para investor. Dengan tugas yang diberikan oleh pihak investor kepada manajemen perusahaan maka manajer harus bertindak untuk melaksanakan kepentingan dari para investor bukan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Ketika pihak manajemen melakukan hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya maka hal itu akan menguras dana perusahaan, dan biaya yang dikeluarkan bertambah. Biaya yang meningkat akan mengurangi laba perusahaan, sehingga terjadilah konflik kepentingan antara investor dan pihak manajemen perusahaan. Tentunya hal ini sangat merugikan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Hal tersebut tidak disukai oleh pemegang saham karena biaya yang dikeluarkan oleh manajer akan menambah biaya perusahaan yang mengakibatkan penurunan laba dan dividen yang akan diterima pemegang saham. Untuk mengurangi terjadinya konflik tersebut maka perilaku manajer harus di awasi dan dipantau melalui keagenen atau dengan memberlakukan kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan. Dengan dilibatkannya manajemen dalam kepemilikan

saham perusahaan, maka manajemen akan lebih meningkatkan kehati-hatian dalam mengelola perusahaan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong manajemen untuk berfokus pada peningkatan kinerja, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya agensi yang lebih untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku manajemen.

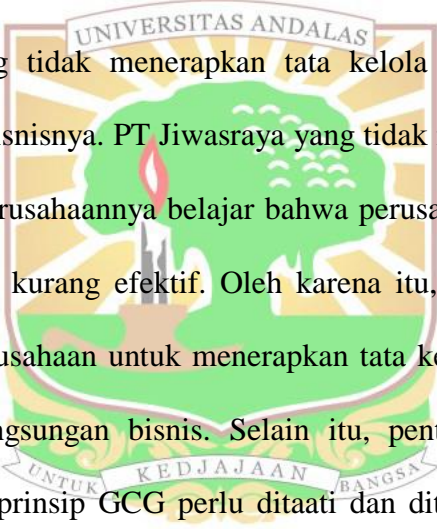
Isu *corporate governance* pernah terjadi pada PT Jiwasraya. Senopati (2020) pada tahun 2019, PT. Jiwasraya terjerat skandal finansial yang berakibat macetnya ekuitas perusahaan hingga tidak mampu membayar kewajiban klaim polis *JS Saving Plan*. Tunggakan polis ini muncul dari banyaknya nasabah yang menginvestasikan dana mereka di *JS Saving Plan* dengan harapan *return* tinggi karena tawaran jaminan *return* sebesar 9-13% yang pada saat itu relatif besar dibandingkan bunga sebesar 5-7% yang ditawarkan deposito bank. Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, menjelaskan bahwa penyebab gagal bayarnya polis asuransi *JS Saving Plan* disebabkan perusahaan menggunakan dana dari *JS Saving Plan* untuk berinvestasi di saham beresiko tinggi. Selain pelanggaran standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan yang merupakan koreksi laporan keuangan oleh pihak ketiga dan pengelolaan investasi yang tidak akurat, kasus skandal keuangan ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang efektif, terutama dari perspektif GCG. Dari kelima prinsip GCG tersebut, PT Jiwasraya gagal menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Pertama, Jiwasraya menggunakan dana yang disimpan oleh nasabahnya melalui *JS Saving Plan* untuk berinvestasi di

saham perusahaan yang berisiko tinggi. Dalam melakukan hal tersebut, Jiwasraya tidak memperhatikan kepentingan stakeholders. Di sisi lain, prinsip akuntabilitas menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan stakeholders dalam setiap keputusan yang diambil.

Kedua, Jiwasraya tidak pernah mengungkapkan kepada nasabah atau pemerintah penggunaan dana yang terkumpul dari *JS Saving Plan*. Tak hanya itu, laporan keuangan Jiwasraya yang berkali-kali diaudit oleh OJK, BPK, dan KAP PwC Indonesia selalu menunjukkan kejanggalan dalam pelaporan aset keuangannya. Kedua kejadian tersebut menunjukkan bahwa Jiwasraya tidak objektif dalam menyajikan laporan keuangannya dengan tidak menampilkan angka-angka yang sebenarnya dalam laporan keuangan perusahaan dan dengan menyimpan informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh stakeholders perusahaan. Dengan fakta tersebut, terbukti Jiwasraya telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, yang merupakan bentuk kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaannya.

Terakhir, Jiwasraya tidak dapat memenuhi klaim polis nasabahnya dan ini merupakan bentuk tidak terpenuhinya tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Tak hanya itu, depresiasi ekuitas hingga menyentuh angka negatif akibat berinvestasi pada saham berisiko tinggi bisa dilihat sebagai bentuk kegagalan Jiwasraya mencapai keberlangsungan bisnis. Selain itu, hasil audit BPK menduga

perseroan melakukan manipulasi harga dalam transaksi saham yang jika benar merupakan bentuk ketidakpatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegagalan memenuhi klaim kebijakan *JS Saving Plan*, menyusutnya ekuitas perusahaan menjadi negatif, dan dugaan manipulasi harga dalam transaksi saham perseroan menunjukkan bahwa Jiwasraya gagal melaksanakan prinsip tanggung jawab.



Perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola perusahaan secara efektif terancam gagal dalam bisnisnya. PT Jiwasraya yang tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik di perusahaannya belajar bahwa perusahaan bisa jatuh karena tata kelola perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga keberlangsungan bisnis. Selain itu, penting juga sebagai seorang akuntan bahwa prinsip-prinsip GCG perlu ditaati dan ditegakkan, agar kasus-kasus seperti skandal Jiwasraya tidak lagi terjadi.

Didalam konsep *corporate governance* terdapat beberapa mekanisme. Mekanisme ini berperan sebagai alat kontrol untuk memastikan *top manager* di perusahaan dalam membuat keputusan-keputusan strategik yang diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan bijaksana bagi semua yang terlibat di perusahaan. Mekanisme ini adalah suatu prosedur dan hubungan yang sangat jelas antara pengambil keputusan dengan pihak yang bertugas melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

Baru-baru ini, dugaan manfaat tata kelola perusahaan (CG) telah menjadi isu yang sangat diperdebatkan, terutama untuk pasar negara berkembang di Asia, di mana pengaturan kelembagaan berbeda secara signifikan dari yang ada di bagian lain dunia. *Performance persistence* merupakan faktor penting dalam sebuah pembiayaan kembali dan menurunkan biaya pinjaman perusahaan. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik dapat ditunjukkan dengan *performance persistence* yang tinggi.

Bebchuk (2013) menunjukkan bahwa hubungan antara tata kelola dan *performance persistence* berbasis akuntansi diukur dengan pengembalian aset atau ROA yang stabil dalam waktu ke waktu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hubungan yang terus menerus antara tata kelola dengan *performance persistence* dapat menjadi alat yang berguna bagi peneliti, investor dan pembuat kebijakan. Epstein (2008) *performance persistence* dianggap sebagai kesinambungan operasi perusahaan. Ini dapat diartikan sebagai informasi positif itu sendiri, serta tingkat ambiguitas informasi yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan volatil (Epstein, 2008)

Pentingnya faktor-faktor yang mendasari *performance persistence* akan menjadi tambahan yang menarik untuk memprediksi kebangkrutan di masa yang akan datang. Faktor-faktor seperti karakteristik dewan direksi dan kepemilikan manajemen sama-sama relevan dalam menjelaskan *performance persistence*. Dalam hal struktur pemegang saham, kami menemukan bahwa keberadaan pemegang saham dominan bermanfaat bagi *performance persistence*, tetapi konsentrasi kepemilikan dapat

meningkatkan risiko penggabungan dan keuntungan pribadi dalam kendali pemegang saham besar. Secara keseluruhan, data mendukung gagasan itu terstruktur dengan baik dewan direksi, dengan posisi terpisah untuk peran CEO dan ketua, serta dewan yang lebih kecil umumnya cenderung mendukung *performance persistence*. Dewan direksi yang efektif, selain memantau kinerja manajer secara ketat, memainkan peran proaktif dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga memastikan bahwa manajer perusahaan melaksanakan tugas mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan pemegang saham (Mishra, 2021)

Rapat dewan komisaris merupakan atribut dewan yang relevan dengan nilai penting. Sementara beberapa penelitian telah menyatakan bahwa rapat dewan bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, yang lain berpendapat bahwa rapat ini tidak selalu berguna karena kurangnya waktu atau biaya yang terlibat. Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang hubungan antara frekuensi rapat dewan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kami juga mempertimbangkan rapat dewan saat membangun *corporate governance*. Banyak parameter *corporate governance* seperti struktur kepemilikan, independensi dewan, rapat dewan, pasar untuk kontrol perusahaan dan persaingan pasar (Varshney, 2012).

Di AS, komisaris independen biasanya dianggap sebagai pengawas yang baik, karena mereka memiliki insentif yang baik dan memiliki lebih sedikit hubungan dengan CEO. Mereka mungkin juga terkena risiko reputasi yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja (Conyon, 2016). Sehingga, hal ini memungkinkan para komisaris independen untuk lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat mereka, bahkan jika

mereka berbeda pendapat secara signifikan dari mayoritas. Dan juga dengan independensi yang tinggi dan upaya pemantauan yang akan mempengaruhi *performance persistence*.

Menurut Graham(2008) kepemilikan negara tidak terkait dengan *performance persistence* yang lebih rendah, tetapi berpengaruh positif terhadap biaya pinjaman. Lebih lanjutnya, perusahaan yang menunjukkan *performance persistence* memiliki biaya pembiayaan kembali yang lebih rendah (suku bunga pinjaman bank), yang secara ekonomi signifikan karena pinjaman bank adalah sumber pendanaan utama dan dapat digunakan oleh investor sebagai sinyal yang berharga. Firth (2007) menunjukkan bahwa dewan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas akuntansi, sedangkan Ding (2013) menemukan korelasi negatif antara ukuran dewan pengawas dan kompensasi dewan.

Jia (2009) menemukan bahwa, untuk emiten di mana kecurangan telah dilakukan, ukuran dewan pengawas yang lebih besar dikaitkan dengan sanksi yang lebih berat. Secara bersama-sama, kami mengharapkan peningkatan ukuran dewan pengawas berkorelasi positif dengan kualitas pemantauan. Peng (2010) perhatikan bahwa memiliki file CEO bersama dan jabatan ketua cenderung memberi CEO lebih banyak kekuasaan, yang dapat menurunkan independensi dewan karena biaya agensi yang lebih tinggi.

Sehingga, dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa independensi yang tinggi dan upaya pemantauan dapat memberikan pengaruh terhadap *performance persistence*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk



menulis tesis dengan judul “**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Performance Persistence***” Studi kasus pada perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *performance persistence*?
2. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap *performance persistence*?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *performance persistence*?
4. Bagaimana pengaruh rapat dewan komisaris terhadap *performance persistence*?
5. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *performance persistence*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *performance persistence*.

2. Untuk membuktikan pengaruh dewan direksi berpengaruh terhadap *performance persistence*.
3. Untuk membuktikan pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *performance persistence*.
4. Untuk membuktikan pengaruh rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *performance persistence*.
5. Untuk membuktikan pengaruh komite audit terhadap *performance persistence*?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Investor, sebagai pelaku investasi di pasar modal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa tambahan informasi dalam menentukan keputusan investasibagi investor.
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengawasan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan penyajian laporan keuangan yang lebih berintegritas
3. Bagi akademik, sebagai praktisi dan pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau literatur yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pasar modal.



4. Bagi penulis, sebagaipeneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan untuk menambah wawasan yang mengedepankan pola pikir ilmiah dalam menyikapi fenomena yang terjadi di bidang akuntansi, keuangan, dan pasar modal.

